

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permasalahan gizi dalam masyarakat menjadi salah satu hambatan dalam upaya membangun sebuah bangsa untuk menciptakan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan memiliki tingkat produktivitas tinggi. Kemiskinan dan kekurangan gizi sering kali terkait erat, sehingga peningkatan status gizi menjadi kunci untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara menyeluruh. Meskipun masalah gizi dapat dialami oleh semua kelompok usia, namun dalam kelompok umur tertentu, kondisi gizi seseorang dapat mempengaruhi status gizi mereka pada fase siklus kehidupan berikutnya, seperti pada wanita dalam usia reproduktif atau yang sudah menikah. (Maflahah, 2019).

Stunting merupakan masalah gizi yang berdampak serius terhadap pertumbuhan anak dan masih menjadi perhatian utama di masyarakat Kelurahan Bandarharjo, Kota Semarang, ibu kota Provinsi Jawa Tengah. Masalah ini disebabkan oleh kekurangan gizi akut yang terjadi akibat asupan nutrisi yang tidak memadai, yang berujung pada keterlambatan pertumbuhan anak. Perhatian khusus terhadap masalah ini telah diprioritaskan oleh Pemerintah Indonesia, mengingat kontribusi stunting terhadap persentase kematian anak yang cukup signifikan, yakni sekitar 15-17 persen. Selain itu, stunting juga merupakan ancaman besar bagi kualitas hidup manusia secara keseluruhan, yang dapat menyebabkan munculnya "generasi yang terhambat" di masa depan.

Stunting merupakan salah satu representasi dari kekurangan gizi kronis yang dialami oleh anak selama masa pertumbuhan dan perkembangannya sejak dini. Kondisi stunting terjadi sebagai akibat dari kekurangan gizi kronis yang dimulai sejak masa kehamilan hingga anak mencapai usia dua tahun, yaitu periode kritis yang dikenal sebagai seribu hari pertama kehidupan anak (Mauludiyah, 2020).

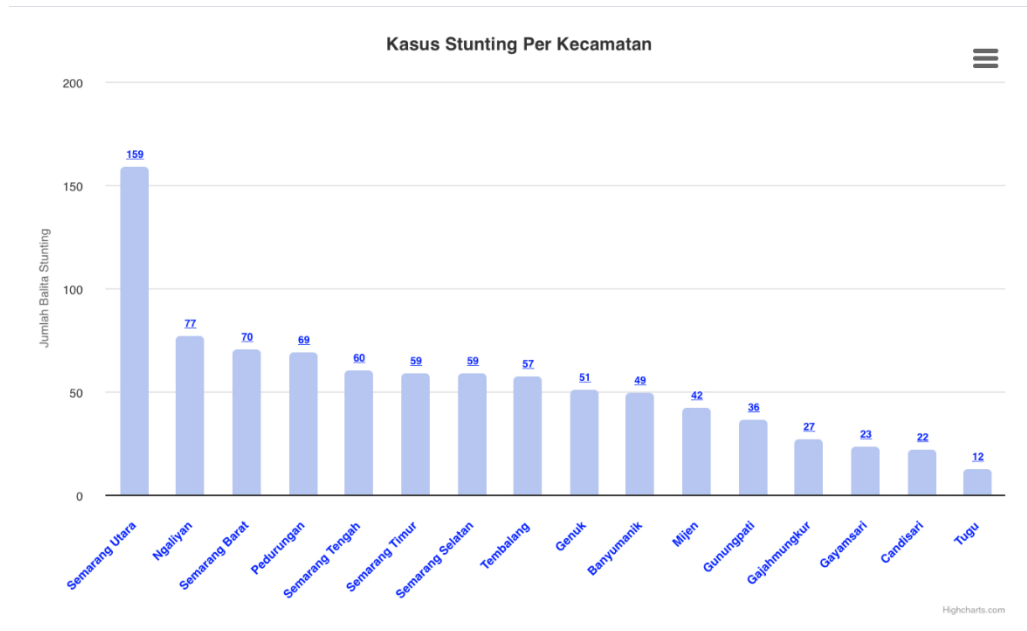
Stunting tidak hanya mempengaruhi pertumbuhan fisik anak, tetapi juga dapat menghambat perkembangan kognitif dan menurunkan kualitas belajar, bahkan berpotensi menurunkan produktivitas di usia dewasa serta meningkatkan risiko penyakit tidak menular. Penyebab stunting meliputi asupan gizi yang rendah dan paparan berulang terhadap penyakit yang mungkin disebabkan oleh lingkungan yang tidak sehat. Penilaian status gizi anak berdasarkan indeks Panjang Badan (PB/U) atau Tinggi Badan (TB/U) sesuai dengan usianya, dengan hasil pengukuran yang berada di bawah ambang batas Z-Score kurang dari -2,00 SD (pendek) dan kurang dari -3,00 SD (sangat pendek) menurut standar antropometri (KEMENKES RI, 2016).

Sejak tahun 2012, pengentasan stunting telah menjadi topik yang hangat di seluruh dunia. World Health Organization (WHO) mengambil langkah signifikan dengan mengadopsi resolusi tentang nutrisi ibu, bayi, dan anak kecil, dengan tujuan mengurangi jumlah balita pendek. Rencana Implementasi Komprehensif yang diinisiasi pada tahun 2012 bertujuan untuk memperbaiki status gizi anak dengan menargetkan pengurangan sebanyak 40% kasus balita pendek. Perkembangan Rencana Implementasi Komprehensif ini sejalan dengan lahirnya Sustainable Development Goals (SDGs) pada tahun 2015. SDG:s adalah program pembaharuan

yang diinisiasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi global dan mendorong perubahan positif dalam upaya memajukan peradaban secara global. Rencana Implementasi Komprehensif (2012–2025) kemudian menjadi bagian integral dari program turunan yang berkaitan dengan visi dan misi SDGs. SDGs merupakan seruan universal untuk bertindak demi mengakhiri kemiskinan, melindungi planet, serta memastikan perdamaian dan kemakmuran bagi semua orang (United Nations, 2015).

Dinas Kesehatan Kota Semarang mencatat adanya 1.367 anak yang mengalami stunting akibat kekurangan gizi pada tahun tertentu. Pada 2019, prevalensi stunting tercatat sebesar 2,57%, kemudian meningkat menjadi 3,13% pada awal tahun 2020 seiring dengan munculnya pandemi COVID-19. Berdasarkan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi stunting di Indonesia mencapai 24,4%, sementara di Jawa Tengah angkanya adalah 20,9%. Kota Semarang sendiri tercatat memiliki prevalensi stunting yang cukup tinggi di Jawa Tengah, yaitu sebesar 21,3%. Di dalam Kota Semarang, wilayah Semarang Utara memiliki prevalensi stunting tertinggi dengan angka 14,3%. Puskesmas Bandarharjo Kota Semarang memiliki prevalensi anak stunting terbesar pada tahun 2021 menurut data Dinas Kesehatan Kota Semarang dengan angka 8,9%. Stunting di Kecamatan Semarang Utara paling banyak disumbangkan oleh Puskesmas Bandarharjo dimana mencapai angka 17,38%, pada Tahun 2019 sebanyak 31, Tahun 2020 meningkat menjadi 64 kasus, dan pada Maret 2021 kembali tercatat bahwa Puskesmas Bandarharjo merupakan kasus terbanyak yakni 42 Kasus.

Tabel 1.1
Data Kasus Stunting Per Kecamatan Kota Semarang



Sumber : Dashboard Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Semarang, 2023

Pemerintah masih mengupayakan penanganan stunting dari tahun ke tahun, sebagaimana masalah ini dapat dibuktikan dengan adanya berbagai kebijakan yang diterapkan untuk mengatasinya. Kebijakan-kebijakan tersebut meliputi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009, s.a.), Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013), dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Upaya Perbaikan Gizi, serta undang-undang lain yang didesain untuk mendukung upaya penanganan stunting (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, s.a.) Selain itu, permasalahan stunting telah menjadi bagian dari program prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Kebijakan-kebijakan tersebut menjadi panduan bagi daerah dalam menangani permasalahan stunting yang terjadi di wilayahnya. Contohnya, Kota Semarang telah mengeluarkan peraturan khusus terkait penanganan stunting melalui Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Percepatan Pencegahan Penanganan Stunting.

Prevalensi stunting di Kota Semarang tercatat sebesar 1,6 persen dari total populasi anak yang ada. Menurut informasi yang dikumpulkan oleh Dinas Kesehatan Kota Semarang, sebagian besar kasus stunting terakumulasi di Kecamatan Semarang Utara, dengan jumlah kasus terbanyak mencapai 236. Distribusi kasus tersebut tersebar di beberapa wilayah kecamatan Semarang Utara yakni Tanjungmas, Bandarharjo, Kuningan, Dadapsari, Plombokan, Purwosari, dan beberapa kelurahan lainnya. Kelurahan Bandarharjo sendiri termasuk yang tertinggi di Kecamatan Semarang Utara dan beberapa kali menjadi yang tertinggi di Kota Semarang pada Tahun 2017 dan 2021 hingga tahun 2023 bandarharjo masih menduduki peringkat 3 (tiga) besar kelurahan dengan kasus Stunting tertinggi di Kecamatan Semarang Utara dan Kota Semarang,

Tabel 1.2
Angka Kematian Bayi Puskesmas Bandarharjo

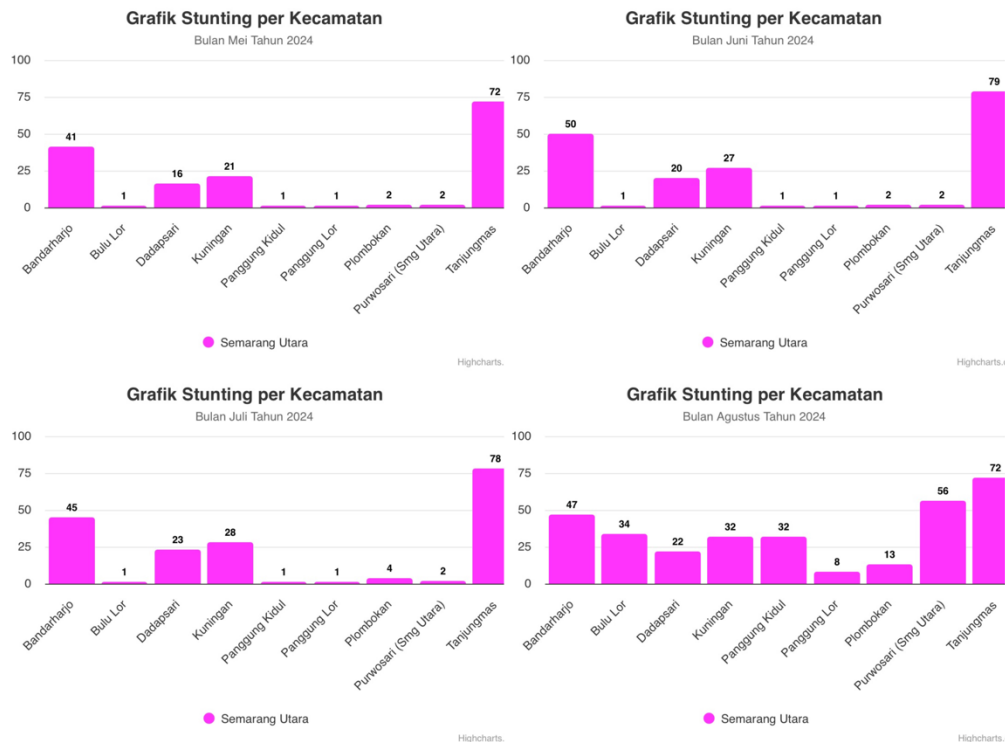


Sumber: Profil kesehatan Puskesmas Bandarharjo, 2023

Berdasarkan data dari Profil Kesehatan Puskesmas Bandarharjo tahun 2024, angka kematian bayi menunjukkan beberapa kategori yang signifikan, yang mencerminkan tantangan dalam upaya meningkatkan kesehatan ibu dan anak di wilayah tersebut. Kematian post neonatal, yang didefinisikan sebagai kematian yang terjadi pada bayi berusia 28 hari hingga 1 tahun, tercatat sebanyak 1 anak. Kematian dalam kategori ini sering kali dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti infeksi, malnutrisi, dan akses yang terbatas terhadap layanan kesehatan yang berkualitas.

Sementara itu, kematian bayi, yang mencakup kematian dalam 28 hari pertama kehidupan, mencapai angka tertinggi dengan 2 anak. Kematian bayi baru lahir sering kali disebabkan oleh komplikasi saat persalinan, kelainan bawaan, atau kondisi kesehatan ibu yang tidak terkelola dengan baik selama kehamilan. Selain itu, terdapat juga kematian pada kelompok anak balita, yang didefinisikan sebagai anak berusia 1 hingga 5 tahun, dan neonatal, yang masing-masing tercatat sebanyak 1 anak. Kematian pada kelompok anak balita dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk penyakit infeksi, malnutrisi, dan kurangnya akses terhadap perawatan kesehatan yang memadai.

Tabel 1.3
Grafik Stunting per Kecamatan



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Semarang, 2024

Berdasarkan data yang diperoleh, kasus stunting di Kelurahan Bandarharjo menunjukkan angka yang mengkhawatirkan selama periode Mei hingga Agustus 2024. Pada bulan Mei, tercatat sebanyak 41 anak mengalami stunting, menjadikannya sebagai kasus tertinggi kedua di Kecamatan Semarang Utara. Angka ini meningkat pada bulan Juni menjadi 50 anak, yang menunjukkan tren yang mengkhawatirkan dalam masalah gizi anak di wilayah tersebut. Meskipun terjadi penurunan pada bulan Juli dengan 45 anak yang terdiagnosis stunting, angka tersebut kembali meningkat menjadi 47 anak pada bulan Agustus. Peningkatan kasus stunting ini mencerminkan tantangan serius dalam upaya pencegahan dan penanganan masalah gizi di Kelurahan Bandarharjo.

Berdasarkan pra-survey peneliti pada hari Rabu, 04 September 2024 dalam praktik penanganan stunting di Kelurahan Bandarharjo, terdapat beberapa permasalahan pada kolaborasi baik antar pemerintah maupun masyarakat. Pemgentasan *stunting* di Kelurahan Bandarharjo terdapat permasalahan, seperti Program pelaksanaan *stunting* di Kelurahan Banjarharjo belum optimal diantaranya PMT hanya sekedar didistribusikan tanpa di *monitor*, Dapur Sehat yang saat ini *vacum*, dan pendampingan oleh Kader terdapat keterbatasan dana dan SDM, koordinasi kolaborasi antar Kader Posyandu, yang kurang maksimal karena rendahnya kesadaran masyarakat, belum terdapat inovasi yang optimal untuk kolaborasi penanganan *stunting* yang dikaitkan dengan kebutuhan penuntasan permasalahan banyaknya kuantitas *stunting* di Kelurahan Bandarharjo seperti kemiskinan dan sanitasi yang buruk, adanya ketidakakuratan data posyandu akibat masih ditemukan *Human Error* dalam pengukuran bayi dan batuta yang stunting, kurangnya infrastruktur untuk pengentasan *stunting* di Kelurahan Banjarharjo.

PMT (Pemberian Makanan Tambahan) saat ini hanya berupa kudapan, padahal pemberian makanan tambahan (PMT) adalah salah satu aspek penting dalam upaya memperbaiki kondisi kelompok yang rentan terhadap kekurangan gizi, khususnya pada balita. Bahan makanan yang digunakan dalam PMT sebaiknya berasal dari bahan lokal atau yang dapat diproduksi di daerah setempat, agar program ini memiliki peluang keberlanjutan yang lebih tinggi. (Bagian Gizi Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur, 2008 dalam Ningrum, 2015:63).

Stunting di Bandarharjo, Semarang, mencerminkan gambaran yang kompleks dari masalah kesehatan masyarakat. Faktor-faktor seperti ketidakstabilan

ekonomi, kurangnya akses terhadap gizi yang memadai, tingkat pendidikan yang rendah, serta sanitasi yang buruk telah menyebabkan tingginya angka kejadian stunting di wilayah tersebut, selain ketidakakuratan dalam pencatatan atau pengukuran bayi dan batuta, serta belum adanya pertemuan kader secara rutin untuk membahas stunting. Stunting dapat mempengaruhi pertumbuhan fisik anak, juga pada perkembangan kognitif serta kemampuan mereka dalam belajar. Upaya-upaya untuk mengatasi stunting di Bandarharjo harus melibatkan semua pihak, termasuk pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, sektor swasta, juga masyarakat setempat, dengan fokus pada peningkatan akses terhadap gizi berkualitas, pendidikan tentang pola makan yang sehat, pemberdayaan ekonomi keluarga, dan perbaikan infrastruktur sanitasi. Seperti yang diungkapkan oleh *World Health Organization* (WHO) (2021), "Kolaborasi multisektoral adalah kunci untuk mengatasi masalah gizi, termasuk stunting, karena tidak ada satu sektor pun yang dapat menyelesaikan masalah ini sendirian." Oleh karena itu, fokus harus diberikan pada peningkatan akses terhadap gizi berkualitas, pendidikan tentang pola makan yang sehat, pemberdayaan ekonomi keluarga, dan perbaikan infrastruktur sanitasi. Dengan pendekatan kolaboratif yang melibatkan semua pihak, diharapkan angka stunting di Bandarharjo dapat ditekan dan kesehatan anak-anak di wilayah tersebut dapat ditingkatkan secara signifikan.

Masalah seperti kemiskinan, ketidaksetaraan akses terhadap gizi yang baik, dan layanan kesehatan yang terbatas mungkin masih menjadi faktor yang memengaruhi kasus stunting. Oleh karena itu, perlunya tetap fokus pada pemecahan

masalah struktural yang mendasari agar penurunan kasus stunting dapat dipertahankan dalam jangka panjang.

Menurut keterangan kader posyandu pada pra-survey yang dilakukan pada Rabu, 04 september 2024 pertemuan dengan para kader, PKK, dan pemerintah setempat seperti puskesmas dan kelurahan hanya dilakukan paling banyak 1 Tahun 4 (empat) kali dan itupun tidak rutin. Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui dampak jika anak mengalami stunting karena kurangnya pengetahuan. Selain itu juga karena sebagian masyarakat menganggap sepele kasus *stunting*. Pada pertemuan yang dilakukan tersebut tidak semua kader dari setiap RW di Kelurahan Bandarharjo hadir karena keterbatasan dana dimana terdapat dana sebesar RP. 70.000,00 untuk operasionalisasi seperti sosialisasi atau rapat untuk penanganan stunting namun untuk transportasi dan sebagainya ditanggung masing-masing kader posyandu. Akibatnya, beberapa *stakeholder* kerap "malas" untuk mengikuti pertemuan kader di rumah sigap dan sosialisasi yang dimana akhirnya masih ada kader yang belum paham mengenai cara pengukuran bayi, pentingnya penanganan stunting, sehingga informasi yang disampaikan oleh ketua Kader tidak tersampaikan secara maksimal kepada masyarakat.

Sebagaimana diungkapkan oleh Faizah dkk., (2024), "Pemberian dana intensif untuk kader posyandu sangat penting untuk meningkatkan kapasitas dan motivasi mereka dalam melakukan sosialisasi dan penanganan masalah gizi, termasuk stunting." Dengan adanya dukungan dana yang memadai, diharapkan kader posyandu dapat lebih aktif dalam melaksanakan program-program kesehatan

dan memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat mengenai pentingnya penanganan stunting.

Dalam membangun kepercayaan, yang belum dapat dicapai di Kelurahan Bandarharjo yaitu rasa saling tidak percaya antar *stakeholder*. Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kesehatan masih rendah. Hal ini disebabkan oleh kondisi perekonomian masyarakat yang lemah sehingga dalam pemberian gizi kepada anak tidak terpenuhi dengan baik dan para lembaga kesehatan atau pemerintah setempat juga minim upaya untuk mensupport asupan gizi balita selain dari PMT. Selain itu masyarakat merasa tanpa mengikuti anjuran lembaga kesehatan pun anak mereka tetap sehat. Kepercayaan antar *stakeholder* pun masih minim, karena sering terjadi perbedaan pendapat antar kader dalam program sosialisasi penanganan stunting, seperti beberapa kader kurang masih ada yang hanya menangani stunting dengan ”lulus umur” bahwa batuta yang tadinya stunting dibiarkan dan beranggapan bahwa ia akan ”besar sendiri” saat sudah balita.

Tabel 1.4

Data Pertemuan Kader dan PKK Kelurahan Bandarharjo

NO	Bulan	Pertemuan Kader	RW
1	Mei	Penimbangan Bayi dan Balita	3
2	Juni	Pertemuan Kader Kecamatan	6
3	Juli	-	
4	Agustus	Lomba PKK	8
5	September	Rapat Koor	4

Sumber: Diolah, Data Kader Posyandu Bandarharjo (2024)

Berdasarkan Handayani *et al.*, (2023) dan Maldini, *et al.* (2013) menyatakan bahwa ekonomi berdampak pada kejadian stunting balita, menjelaskan bahwa ekonomi berdampak 0,043% yang menggambarkan tingkat ekonomi berdampak signifikan terhadap kejadian stunting. Hal ini didukung oleh penelitian dari Handayani, *et al.* (2023) ekonomi rendah memiliki resiko stunting 4,13 kali lebih besar dibanding anak dengan status ekonomi keluarga yang tinggi. Banyak anjuran dari lembaga kesehatan kepada para orang tua mengenai pemenuhan gizi anak terabaikan. Ketidakkonsistenan pemerintah dalam penurunan angka stunting dengan tidak adanya upaya untuk memenuhi atau mencegah stunting pada anak melalui pemantauan oleh lembaga kesehatan tentang pemberian makanan bergizi. Keterangan dari kader posyandu menyatakan bahwa pemberian asupan gizi pada balita ini tidak selalu dilakukan setiap bulan karena tergantung dari pihak posyandu yang memberikannya kadang bisa 2 atau 3 bulan sekali dan tidak selalu tepat pada saat jam makan siang. Padahal masyarakat mengandalkan asupan gizi dari pemerintah karena mereka kurang mampu untuk memberikan asupan gizi sesuai standar yang baik. Hal ini dibuktikan dengan pekerjaan sebanyak 596 orang (63,3%) sebagai petani yang memiliki penghasilan rendah (BPS, 2023). Para *stakeholder* belum merasakan keuntungan dari kolaborasi penanganan stunting di Kelurahan Bandarharjo ini karena masyarakat masih acuh tak acuh dengan himbauan tenaga kesehatan serta pemerintahpun tidak konsisten perannya dalam penurunan angka stunting ini. Berdasarkan hasil pra-survey pada Rabu, 04 September 2024 ketua Kader juga mengatakan bahwa para kader tidak mendapatkan upah/gaji dan ada keterbatasan dana sehingga hal tersebut yang

menjadi alasan bahwa belum semua *stakeholder* merasa terdapat keuntungan dari kolaborasi yang ada.

Dalam konteks penanganan stunting di Kelurahan Bandarharjo, Kota Semarang, penting untuk mengimplementasikan proses *collaborative governance* yang efektif. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga kesehatan, dan masyarakat menjadi hal utama dalam merumuskan dan implementasi program-program secara menyeluruh dan berkelanjutan (Siskasari *et al.*, 2020). Memahami faktor-faktor yang berpengaruh pada perbedaan penurunan kasus stunting di Kelurahan Bandarharjo yang merupakan salah satu Kelurahan dengan kasus tertinggi di Kecamatan Semarang Utara, sehingga dapat mengidentifikasi strategi kolaboratif yang tepat untuk meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang gizi dan kesehatan, serta meningkatkan kondisi lingkungan secara keseluruhan. Untuk demikian, proses *collaborative governance* bukan hanya menjadi konsep, tetapi juga menjadi landasan yang kuat dalam upaya bersama untuk mengatasi masalah stunting di Kelurahan Bandarharjo dan memastikan kesejahteraan anak-anak serta kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

Berbagai penelitian sebelumnya telah menekankan pentingnya penerapan *Collaborative Governance*, terutama dalam upaya penanggulangan dan pengurangan prevalensi stunting. Penelitian yang dilakukan oleh Herlianti (2020), Lailia dkk (2021), dan Rosalia *et al.* (2022) menunjukkan temuan serupa yang menegaskan bahwa kolaborasi antar pemangku kepentingan sangat penting dalam keberhasilan program pengurangan angka stunting. Hasil analisis tersebut juga

mengungkapkan bahwa pencapaian tujuan dalam penanganan stunting tidak hanya menjadi kewajiban pemerintah, tetapi juga melibatkan sektor lain, termasuk kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dunia akademik, dan masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut didukung oleh, Purbani dkk (2019) yang menyatakan bahwa dukungan dan komitmen atas kolaborasi antar *stakeholders* dibutuhkan dalam upaya menjapai tujuan dan saling berkesinambungan dari pelaksanaan suatu program. Penelitian ini berfokus pada percepatan penurunan angka prevalensi stunting di Kelurahan Bandarharjo. Peran aktif pemerintah dan masyarakat menjadi kunci penurunan stunting. Dari penjelasan permasalahan di atas peneliti ingin melakukan penelitian mengenai masalah mengapa proses *Collaborative Governance* dalam penanganan stunting belum optimal di Kelurahan Bandarharjo?

1.2 Identifikasi Masalah

1. Diskusi antar *stakeholder* dan partisipasi masyarakat masih minim dengan jumlah pertemuan hanya dilaksanakan 4 (empat) kali per-tahun, bahkan hampir tidak semua *stakeholder* mengikuti pertemuan yang ada.
2. Adanya rasa kurang percaya antar *stakeholder* maupun masyarakat mengenai asupan gizi yang baik untuk mencegah stunting. Hal ini dikarenakan perbedaan cara pandang terhadap kebutuhan makanan sehat.
3. Pemerintah setempat tidak konsisten dalam mencegah atau menurunkan angka stunting, dimana pemerintah tidak secara rutin mengalokasikan dana operasional pada kader untuk mengikuti sosialisasi pencegahan stunting.

4. Pemahaman bersama antar *stakeholder* yang masih sangat minim mengenai pentingnya penurunan angka stunting. Hal ini dikarenakan minimnya komunikasi yang efektif antar *stakeholder* dan masyarakat.
5. Belum adanya rasa saling menguntungkan dalam penanganan stunting, belum terciptanya kolaborasi antar *stakeholder*, pemerintah, dan masyarakat dalam penurunan angka stunting di Kelurahan Bandarharjo.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan analisis di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses *collaborative governance* dalam penanganan stunting di Kelurahan Bandarharjo?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat proses *collaborative governance* di Kelurahan Bandarharjo?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan identifikasi dari permasalahan yang telah diuraikan dalam latar belakang. Tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan proses *collaborative governance* dalam penanganan stunting di Kelurahan Bandarharjo
2. Menganalisis faktor pendukung dan penghambat proses *collaborative governance* di Kelurahan Bandarharjo.

1.5 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan penelitian ini, maka manfaat yang akan diperoleh sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis:

- a Memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan penurunan kasus stunting.
- b Menyediakan panduan bagi *stakeholder* lokal dalam merumuskan strategi yang tepat untuk meningkatkan efektivitas program penanganan stunting di Kelurahan Bandarharjo melalui proses *collaborative governance*.
- c Memperkuat kolaborasi antara pemerintah, lembaga kesehatan, masyarakat, dan sektor swasta dalam penanganan stunting di tingkat lokal.

2. Manfaat Teoritis:

- a Menyumbangkan pengetahuan baru dalam bidang penelitian kesehatan masyarakat, khususnya dalam konteks penanganan stunting dan proses *collaborative governance*.
- b Memperkaya literatur ilmiah tentang faktor-faktor yang memengaruhi perbedaan penurunan kasus stunting di tingkat lokal, yang dapat menjadi landasan bagi penelitian lanjutan dalam bidang ini.
- c Memberikan wawasan baru tentang pentingnya kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan dalam menangani masalah kesehatan masyarakat yang kompleks, seperti stunting.

1.6 Penelitian Terdahulu

1.6.1 Kajian Pustaka

No	Judul	Tujuan Penelitian	Landasan Teori	Metode penelitian	Hasil
1	Ipan dkk (2023) “Collaborative governance dalam Penanganan Stunting”	Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi kolaborasi dalam penanganan stunting di UPTD Puskesmas Ciampel.	Dalam menganalisis data, peneliti mengaplikasikan teori collaborative governance yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash (2007), yang menitikberatkan pada proses kolaborasi.	Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.	Penelitian ini bertujuan untuk menilai implementasi proses kolaborasi dalam penanganan stunting di UPTD Puskesmas Ciampel, yang melibatkan sektor swasta dan masyarakat sebagai bagian dari upaya mengatasi masalah stunting yang kompleks. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif, dengan pengumpulan data melalui observasi langsung di lapangan untuk memperoleh informasi yang relevan. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teori collaborative governance menurut Ansell dan Gash (2007).
2	Sahrul Gunawan (2022) “Collaborative governance dalam penanganan covid 19 di Kabupaten Bone”.	Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pelaksanaan governance kolaboratif dalam program penanggulangan stunting	Untuk menganalisis permasalahan ini, penelitian ini menggunakan teori governance kolaboratif yang dikembangkan oleh	Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan metode studi kasus, yang difokuskan pada	Penelitian ini bertujuan untuk memahami penerapan prinsip-prinsip collaborative governance di Kabupaten Bone dalam upaya penanggulangan COVID-19.

		yang dijalankan oleh PKK Kelurahan Tanjungmas.	Ansell dan Gash (2007), yang menekankan pada proses kolaborasi.	Kelurahan Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara.	Temuan penelitian mengidentifikasi tantangan dan peluang yang muncul dalam penanganan pandemi, di mana pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat perlu bekerja sama secara konsisten dalam merespons hambatan serta memanfaatkan peluang tersebut. Pemerintah juga menerapkan strategi komunikasi melalui debat untuk mempengaruhi masyarakat dalam pembentukan Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Bone pada tahun 2020.
3	Collaborative governance dalam penanggulangan stunting di desa Kalirandu, Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang” yang ditulis oleh Evalia Nuranita Putri dan Herbasuki Nurcahyanto (2022).	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menggambarkan bentuk kolaborasi yang terbentuk dalam upaya penanggulangan stunting di Desa Kalirandu, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong maupun menghambat kolaborasi tersebut.	Teori yang digunakan sebagai dasar dalam penelitian ini adalah konsep governance kolaboratif yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash (2008:544), yang digunakan untuk memahami peran berbagai pemangku kepentingan dalam urusan publik..	Metode penelitian yang diterapkan adalah pendekatan kualitatif deskriptif, dengan tujuh informan yang dijadikan sebagai subjek penelitian.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi dalam penanganan stunting cukup efektif, yang tercermin dalam adanya dialog langsung, pembangunan kepercayaan, komitmen terhadap proses, pemahaman bersama, serta pencapaian hasil sementara yang memadai. Meskipun demikian, terdapat beberapa kendala yang menghambat, seperti rendahnya partisipasi masyarakat melalui kader stunting, dominasi sektor kesehatan dalam penanganan

					stunting di Desa Kalirandu, kurangnya komitmen kepala desa, serta masalah dalam pengungkahan data.
4	Muhammad Muqorrobin Ist (2016) dengan judul “Proses Collaborative governance dalam Bidang Kesehatan (Studi Deskriptif Pelaksanaan Kolaborasi Pengendalian Penyakit TB-HIV)	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kinerja pemerintah melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar.	Teori yang digunakan dalam penelitian ini melibatkan teknik pemeriksaan, sementara keabsahan data dijaga dengan menggunakan pendekatan triangulasi.	Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, dengan lokasi penelitian yang berfokus pada aktor-aktor terkait.	Penelitian ini mengungkapkan bahwa kerjasama yang terjalin masih belum efektif. Dinamika kolaborasi menunjukkan adanya ketidakefektifan dalam penerapan prinsip-prinsip keterlibatan, motivasi bersama, serta pembentukan kapasitas aksi kolektif yang lemah, yang berdampak pada indikator tindakan kolaborasi. Oleh karena itu, kontribusi kelompok TBHIV dalam proses kolaborasi tidak memberikan dampak signifikan, dan adaptasi yang dilakukan belum mampu mengendalikan tindakan selanjutnya secara efektif.
5	Sumanti, R. (2024) Collaborative Governance: Strategi Pencegahan dan Penurunan Prevalensi Stunting. <i>Jurnal Kebijakan Pembangunan</i> , 19(1), 13-26.	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan tata kelola kolaboratif dengan berbagai model, yaitu triple helix, quadra helix, dan penta helix, dalam upaya penanggulangan stunting.	Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori tata kelola kolaboratif yang mencakup model triple helix, quadra helix, dan penta helix.	Metode yang diterapkan adalah tinjauan pustaka terhadap artikel-artikel yang dipublikasikan oleh jurnal nasional dalam periode empat tahun terakhir (2020-2023).	Hasil penelitian menunjukkan bahwa collaborative governance dengan model penta helix stakeholders merupakan model yang paling komprehensif karena melibatkan lima aktor yang saling mendukung pelaksanaan kebijakan pencegahan dan penurunan stunting. Kelima

					aktor tersebut memiliki peran berbeda namun saling mendukung untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Meskipun penerapan collaborative governance dengan model penta helix sudah mulai dilakukan di Indonesia namun masih banyak aspek yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan. Pemerintah perlu mengambil peran lebih besar, bukan hanya sebagai pembuat kebijakan tetapi juga sebagai koordinator, fasilitator, implementer dan akselerator dalam upaya mencegah dan menurunkan stunting.
--	--	--	--	--	---

6	Collaborative public management: coordinated value propositions among public service organizations (Eriksson et al., 2020)	Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji logika di balik pelayanan publik terkait implementasi layanan yang diterima oleh pengguna.	Teori PSL berfokus pada peran koordinasi antar organisasi, dukungan struktur baik secara vertikal maupun horizontal, serta pentingnya kepercayaan yang dibangun melalui interaksi antar pihak terkait. Selain itu, teori ini juga mengakui keterkaitan sistem layanan dalam konteks sosial yang terfragmentasi, khususnya dalam hal sistem kesejahteraan bagi warga negara.	Penelitian ini adalah penelitian jenis tinjauan pustaka.	Pertama, penelitian ini menekankan pentingnya peran koordinasi dan struktur pendukung dalam membangun kolaborasi antar pihak. Kedua, penelitian ini menunjukkan bahwa kesulitan dalam berkolaborasi dapat diatasi dengan adanya rasa saling percaya yang terjalin, meskipun proses tersebut memerlukan waktu untuk membangun. Ketiga, penelitian ini mengakui bahwa sistem layanan—seperti perawatan lansia dalam konteks ini—selalu terhubung dengan berbagai sistem sosial, yang melibatkan aktor-aktor dengan aturan dan norma masing-masing yang dibawa ke dalam proses kolaborasi.
---	--	--	---	--	---

7	Collaboration among public organizations: a systematic literature review on determinants of interinstitutional performance (Costumato, 2021).	Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang terstruktur mengenai kontribusi akademik yang paling penting terkait topik ini, dengan fokus pada elemen-elemen dalam konteks kolaboratif dan mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat meningkatkan kinerjanya.	Pendekatan teoritis yang digunakan adalah SLR (Systematic Literature Review), yang bertujuan untuk memetakan dinamika tata kelola kolaboratif dan kinerja jaringan sektor publik.	Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah tinjauan literatur.	Bentuk kolaborasi yang dibahas dalam penelitian ini memiliki kemiripan dengan hubungan antar lembaga publik. Penelitian ini juga menganalisis faktor-faktor kunci yang mempengaruhi kinerja kolaboratif antar lembaga publik, dengan menyoroti pengaruh kepercayaan, pembagian kekuasaan, gaya kepemimpinan, strategi manajemen, dan tingkat formalisasi dalam mencapai kolaborasi yang efektif dan efisien di antara entitas-entitas publik.
---	---	---	---	--	---

8	Leadership and institutional design in collaborative government digitalisation: Evidence from Belgium, Denmark, Estonia, Germany, and the UK (Breugh et al., 2023)	Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dinamika kolaborasi melalui proyek kolaboratif dan struktur proyek	Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan relasional strategis (SRA) untuk memeriksa sejauh mana kendala desain kelembagaan perilaku kepemimpinan, dan dalam kondisi apa para pemimpin mulai menyesuaikan, menambah pengetahuan pengelolaan digitalisasi pemerintahan.	Metode yang digunakan yaitu studi kasus dengan menyajikan kasus dari 5 negara proyek digitalisasi di Eropa	Meskipun desain kelembagaan sudah jelas fitur-fitur seperti peraturan yang ditetapkan, struktur proyek, dan prosedur operasi standar sangat penting di Pada tahap awal proyek, keterampilan pemimpin dalam memahami dan menyesuaikan fitur-fitur ini sangat penting untuk ditangani masalah terkait proyek dan langkah maju menuju implementasi. Hal ini menggarisbawahi pentingnya memeriksa proyek yang menggunakan pendekatan SRA dan kebutuhan untuk memahami perilaku kepemimpinan dalam konteksnya struktur di mana ia tertanam.
---	--	---	---	--	--

9	Designing boundary resources in digital government platforms for collaborative service innovation (Gong & Li, 2023)	Penelitian ini bertujuan untuk mengkonseptualisasi platform pemerintahan digital dengan teori	Teori ini memadukan antara tindakan (Action design reseach) pada platform layanan pajak nasional dengan kolaborasi lintas lembaga untuk inovasi layanan	Metode penelitian yaitu studi kasus pada pemilik platform pemerintah	Merancang sumber daya batas untuk meningkatkan kolaborasi lintas lembaga dalam inovasi pelayanan publik merupakan tantangan besar bagi pemerintah di perjalanan platform digital. Untuk memandu rancangan ini, pemerintah perlu memahami bagaimana munculnya sumber daya yang berbeda-beda mengatasi ketegangan paradoks antara keterbukaan dan kedekatan, fleksibilitas dan stabilitas, dan generativitas dan kontrol. Praktik ini seringkali kurang memiliki dukungan teoretis karena teori platform yang berakar pada platform komersial belum mempertimbangkan perbedaan cakupan dan karakteristik pemerintahan digital platform
10	Government as a platform, orchestration, and public value creation: The Italian case (Cordella & Paletti, 2019)	Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana penerapan konfigurasi GaaP dapat mendukung administrasi publik dalam meningkatkan pemberian nilai publik.	Dalam penelitian ini, teori yang diterapkan adalah strategi segitiga dalam perancangan nilai publik.	Metode penelitian yaitu studi kasus pada pemilik platform GaaP pemerintah	Karakteristik konfigurasi GaaP dapat memungkinkan administrasi publik Italia untuk melakukannya memberikan nilai publik, namun jika GaaP tidak diatur dengan baik, hal ini dapat menghambat terciptanya nilai publik

11	Collaborative governance pada penerapan Perwali No 79 Tahun 2022 tentang percepatan penurunan stunting di Kota Surabaya, Yunifar , A. T., Kusbandrijo, B., & Puspaningtyas, A. (2022)	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Collaborative Governance dalam konteks Perwali No. 79 Tahun 2022 yang berkaitan dengan percepatan penurunan stunting di Kota Surabaya, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat dan mendukung implementasi tersebut.	Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada teori Ansell dan Gash (2008).	Metode yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif	Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, media massa, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan akademisi berjalan dengan baik, dengan komunikasi yang efektif dan hasil kolaborasi yang positif. Hal ini terlihat dari penurunan prevalensi stunting yang konsisten setiap tahunnya. Namun, salah satu kendala utama dalam upaya penanggulangan stunting adalah tingginya tingkat mobilitas penduduk di Kota Surabaya.
12	Penerapan collaborative Governance Pada Orang Tua Tentang Stunting di Posyandu Puskesmas Sawah Baru Ciputat Kota Tangerang Selatan. Hidayah, T. N., Sulaiman, A., Altriara, D. U., Latipah, L. N., Zanah, N. Q. F., & Herayani, S. (2024)	Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana penerapan governance kolaboratif di kalangan orang tua di Posyandu Puskesmas Sawah Baru Ciputat, Kota Tangerang Selatan, berhasil dalam meningkatkan pengetahuan dan praktik pencegahan stunting.	Penelitian ini berfokus pada penerapan teori governance kolaboratif menurut Ansell dan Gash (2007).	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, dengan peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data. Dalam pendekatan kualitatif, peneliti berfungsi sebagai instrumen manusia yang mengumpulkan dan menganalisis data.	Secara keseluruhan, implementasi kolaborasi di Posyandu Sawah Baru Ciputat, Kota Tangerang Selatan, telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana, yang dapat disimpulkan sebagai optimal.

13	Collaborative Governance Dalam Perencanaan Program Pengentasan Tengkes (Studi Kasus di Desa Tambak Kalisogo). Parikesit, B. S., Heru, H., Vernanda, R. N., & Tantri, I. (2023)	Mengidentifikasi faktor penyebab, menganalisis akar permasalahan, merancang langkah perbaikan, serta mengevaluasi hasil perbaikan yang telah dilakukan.	Peneliti menggunakan Root Cause Analysis (RCA) menurut Ammerman (1998)	Penelitian ini menggunakan pendekatan metode campuran. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan berbagai pihak terkait.	Pelaksanaan program bersama ini dimulai karena kesadaran pihak-pihak yang terlibat terhadap sumber daya yang mereka miliki. Berbagai kegiatan diinisiasi dalam “Rembug Stunting”. Meskipun dampaknya belum dapat dirasakan saat ini, program ini diharapkan dapat memberikan nilai positif di masa depan.
14	Penanganan Stunting Oleh DPPKB Kota Mataram Dalam Pendekatan Collaborative Governance. Ashari, W. K., Adekantari, D. R., Juita, K., & Jaelani, M. A. (2024)	Mengidentifikasi dan menentukan rencana penanganan stunting dengan collaborative governance	Peneliti menerapkan pendekatan Collaborative Governance dalam penelitian ini	Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif melalui metode studi kasus	Pendekatan terbukti efektif meningkatkan kerjasama dan sinergitas dalam penanggulangan stunting, sehingga upaya ini perlu dilanjutkan untuk mencapai target penurunan di Kota Mataram.
15	Collaborative Governance Tentang Kampung Madani Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Kota Surabaya (Studi Perbandingan di Kelurahan Pradah Kalikendal dan Kelurahan Jambangan). Feblianto, D. A. E., Hariyoko, Y., & Basyar, M. R. (2024)	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kolaborasi program kampung madani sebagai upaya pemberdayaan masyarakat miskin serta mengetahui peran dari masing-masing stakeholder.	Teori yang diterapkan dalam penelitian ini adalah collaborative governance menurut Ansell dan Gash.	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan yang meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi.	Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan pemangku kepentingan berjalan dengan lancar, meskipun aturan dasar masih belum mendapat pengesahan resmi. Evaluasi program dilakukan setiap bulan dan dipimpin langsung oleh sekretaris daerah Kota Surabaya.

1.6.2 Administrasi Publik

Pasolong (2014) menyatakan bahwa administrasi merupakan suatu usaha bersama yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Di sisi lain, Syafiie (2010) mengartikan publik sebagai kelompok individu yang memiliki kesamaan dalam pemikiran, perasaan, harapan, sikap, serta tindakan yang sejalan dengan nilai dan norma yang mereka anut. Administrasi publik, seperti yang didefinisikan oleh Felix A. Nigro dan Lloyd G. Nigro (dalam Syafiie, 2010), Kerjasama antara berbagai kelompok dalam pemerintahan, yang melibatkan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, sangat krusial dalam merancang kebijakan publik sebagai bagian dari proses politik. Selain itu, administrasi publik juga memiliki keterkaitan yang erat dengan sektor swasta dan individu dalam memberikan layanan kepada masyarakat (Syafiie, 2010).

Berdasarkan berbagai pengertian tersebut, administrasi publik dapat dipahami sebagai suatu konsep yang melibatkan kolaborasi antara individu atau kelompok dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam ranah pemerintahan. Hal ini mencakup berbagai aspek, termasuk pembuatan kebijakan publik, pelaksanaan program-program pemerintah, serta penyediaan layanan publik kepada masyarakat. Dalam konteks administrasi publik, kolaborasi antara berbagai lembaga pemerintahan seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif sangat penting. Masing-masing cabang pemerintahan memiliki peranannya dalam proses pembuatan kebijakan dan pelaksanaannya. Selain itu, kerjasama dengan sektor swasta dan individu juga merupakan bagian integral dari administrasi publik, terutama dalam menyediakan layanan yang efektif dan efisien kepada masyarakat.

Secara lebih luas, administrasi publik juga melibatkan koordinasi antara berbagai lembaga dan aktor baik di tingkat lokal, nasional, juga internasional. Hal ini mencakup pengelolaan sumber daya publik, penegakan hukum, pengawasan, serta pembangunan dan pengembangan berbagai sektor dalam masyarakat (Almahdali *et al.*, 2024). Dalam konteks demikian, administrasi publik bukan hanya tentang pengaturan internal pemerintahan, tetapi juga melibatkan interaksi yang kompleks antara berbagai pihak untuk mencapai kesejahteraan dan kepentingan bersama.

Menurut serangkaian definisi tersebut, dengan ini administrasi publik merupakan kolaborasi yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan untuk melaksanakan tugas-tugasnya dengan efisien dan efektif guna memberikan pelayanan publik yang optimal. Dalam pelaksanaannya, administrasi publik terlibat dengan berbagai pihak, baik dari sektor swasta dan individu, dalam rangka memberikan pelayanan pada masyarakat secara menyeluruh juga terintegrasi.

1.6.3 Paradigma Administrasi Publik

Menurut penelitian Keban (2008) yang merujuk pada teori Nicholas Henry, konsep Administrasi Negara dapat dibagi menjadi lima perspektif utama. Pembagian ini menunjukkan kompleksitas dan perkembangan pemikiran dalam bidang administrasi publik:

1. Paradigma 1 (Dikotomi Politik Administrasi, 1900-1926) Pada paradigma pertama ini, Frank J. Goodnow dan Leonard D. White memimpin inisiasi pemikiran yang membedakan antara politik dan administrasi. Menurut Goodnow, politik berfokus pada pengambilan kebijakan yang mencerminkan

kehendak rakyat, sedangkan administrasi berkonsentrasi pada implementasi kebijakan tersebut. Meskipun demikian, paradigma ini hanya menekankan pada birokrasi pemerintahan sebagai lokus, sementara pembahasan tentang fokus dan metode administrasi publik tidak digali dengan rinci.

2. Paradigma 2 (Prinsip-Prinsip Administrasi, 1927-1937) Tokoh-tokoh seperti Willoughby, Gullick, dan Urwick mengembangkan paradigma ini dengan dipengaruhi oleh pemikir manajemen klasik seperti Henry Fayol dan F.W. Taylor. Mereka memperkenalkan prinsip-prinsip administrasi yang dikenal dengan POSDCORB (Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, dan Budgeting). Dalam paradigma ini, tidak ada pembahasan jelas tentang lokus administrasi publik, karena mereka beranggapan bahwa prinsip-prinsip tersebut bersifat universal, dapat diterapkan baik di sektor pemerintah maupun swasta.
3. Paradigma 3 (Administrasi Negara sebagai Ilmu Politik, 1950-1970) Pada paradigma ini, terdapat ketegangan mengenai hubungan antara administrasi negara dan ilmu politik. Sebagai konsekuensinya, muncul pandangan baru yang menganggap administrasi publik sebagai bagian dari ilmu politik. Di sini, birokrasi pemerintahan tetap menjadi lokusnya, namun fokusnya menjadi kabur karena prinsip-prinsip administrasi publik dianggap memiliki banyak kelemahan.
4. Paradigma 4 (Administrasi Negara sebagai Ilmu Administrasi, 1956-1970) Paradigma ini mengembangkan pemahaman lebih dalam tentang teori organisasi dan ilmu manajemen secara ilmiah. Fokus utama adalah pada

perilaku organisasi, analisis manajemen, dan penerapan teknologi modern. Namun, meskipun teori yang dikembangkan lebih jelas, lokusnya menjadi kabur, karena asumsi bahwa konsep-konsep ini bisa diterapkan baik dalam dunia bisnis maupun administrasi publik.

5. Paradigma 5 (Administrasi Negara sebagai Administrasi Negara, 1970-sekarang) Pendekatan ini memberikan kerangka yang lebih terperinci terhadap wilayah kajian administrasi, dengan memperjelas ruang lingkup penelaahan. Ranah kajian mencakup dinamika organisasi, prinsip-prinsip pengelolaan, serta analisis kebijakan bermasyarakat, yang secara khusus memusatkan perhatian pada persoalan-persoalan dan kebutuhan publik.

6. Paradigma 6 : *Governance*

Dalam penelitiannya, Taufiqurokhman (2018) memaparkan sistem pemerintahan dimaknai melalui dua peran fundamental yang saling melengkapi. Peran pertama mencakup proses perumusan arah dan strategi nasional yang merepresentasikan visi dan kepentingan bangsa, sedangkan peran kedua difokuskan pada upaya konkret merealisasikan kebijakan yang telah disusun. Perbedaan kedua fungsi ini muncul dari prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) Montesquieu, yang memisahkan lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Lembaga legislatif dan yudikatif menetapkan tujuan negara, sedangkan lembaga eksekutif memiliki peran untuk melaksanakan kebijakan yang telah dirumuskan oleh keduanya, dan dianggap apolitis serta terpisah dari pengaruh politik saat melaksanakan kebijakan tersebut..

1.6.4 Manajemen Publik

Menurut Overman (1984), manajemen publik adalah bidang studi interdisipliner yang memadukan perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian dalam konteks organisasi pemerintahan. Sebagai cabang dari ilmu administrasi publik, manajemen publik mencakup pendekatan praktis untuk merancang program-program administrasi publik, mengubah struktur organisasi, merumuskan kebijakan serta perencanaan manajerial, mengalokasikan sumber daya, mengelola anggaran dan keuangan, mengelola sumber daya manusia, serta menangani masalah audit dan evaluasi. Manajemen publik mencakup pengelolaan lingkungan eksternal organisasi, sementara administrasi publik lebih berfokus pada operasi internal organisasi (Overman, 2010).

Ada empat prinsip fundamental dalam manajemen publik, yang meliputi studi interdisipliner yang mempertimbangkan aspek politik, sosial, dan budaya yang mempengaruhi perubahan dalam dan di luar pemerintahan. Agronof dan McGuire (dalam Kapucu, 2010) memaparkan definisi manajemen publik kolaboratif sebagai proses yang memfasilitasi kerjasama antar-organisasi untuk menyelesaikan masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh satu organisasi saja (Kapucu, 2010). Sedangkan menurut Shafritz dan Russell (dalam Keban, 2008), manajemen adalah usaha seseorang untuk mengelola sebuah organisasi dan mengalokasikan sumber daya dengan tujuan mencapai tujuan organisasi (Keban, 2008).

Minogue (2000) menyatakan bahwa terdapat lima karakteristik utama dari manajemen publik, yaitu (Minogue, 2000):

1. Fokus pada tugas operasional pemerintahan daripada perumusan kebijakan.
2. Menekankan pencapaian tujuan daripada proses dan prosedur
3. Berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pelanggan daripada kebutuhan birokrasi.
4. Lebih mengarah pada memberikan arahan atau pemberdayaan kepada masyarakat daripada memberikan pelayanan langsung kepada mereka.
5. Mengadopsi budaya yang berbeda dari budaya birokrasi tradisional.

Ini menunjukkan bahwa manajemen publik memiliki cakupan yang luas dan mencakup berbagai aspek dalam mengelola organisasi pemerintahan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

1.6.5 Collaborative Governance

Governance, menurut Kooiman (2009:273), merujuk pada sebuah konsep yang menggambarkan interaksi dalam proses pemerintahan, di mana interaksi tersebut memberikan manfaat bagi kedua belah pihak atau lebih dalam suatu hubungan atau kerjasama (Kooiman, 2009). Keban (2008:38) menjelaskan bahwa *governance* merujuk pada suatu sistem yang terdiri dari nilai-nilai, kebijakan, dan lembaga yang bertanggung jawab dalam mengatur bidang ekonomi, sosial, dan politik melalui interaksi antara masyarakat, pemerintah, serta sektor swasta (Keban, 2008). United Nations Development Programme (UNDP) mendefinisikan *governance* sebagai penerapan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi, dan administrasi untuk mengelola berbagai isu yang dihadapi oleh suatu negara (Sedarmayanti, 2003:5). Dalam konteks ini, *governance* menggambarkan cara

berinteraksi dan mengelola urusan-urusan publik yang melibatkan berbagai pihak secara kolektif (Sedarmayanti, 2003).

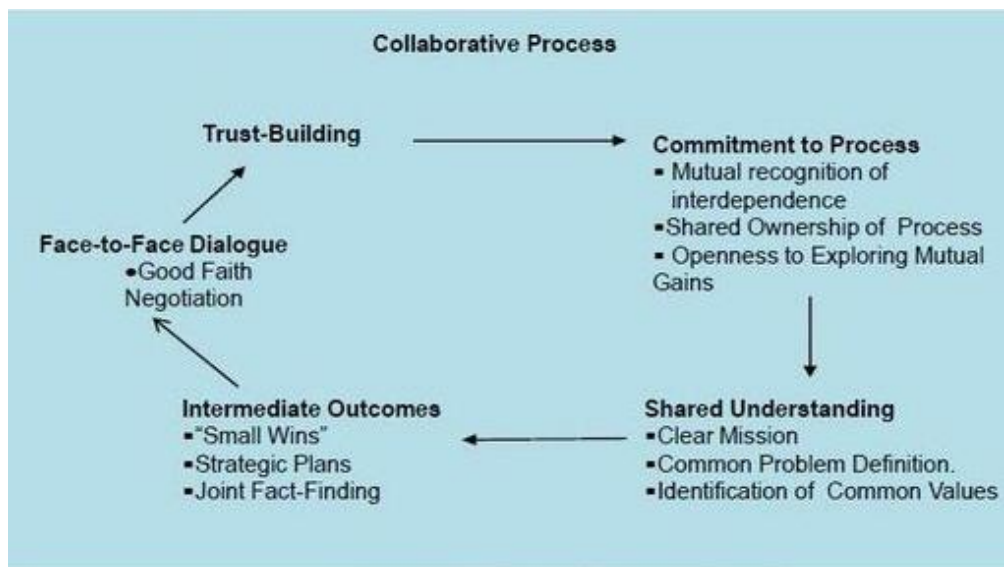
Collaborative governance merupakan suatu sistem tata kelola pemerintahan yang di mana pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta terlibat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan dengan prinsip kesetaraan dan demokrasi, yang bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang mengutamakan kepentingan masyarakat. Dalam kerjasama kolaboratif, setiap pihak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan secara mandiri namun tetap berkomitmen pada kesepakatan bersama.

Collaborative governance hadir sebagai solusi alternatif menghadapi tantangan dalam sistem administrasi pemerintahan. Konsep ini berupaya menyatukan berbagai pihak dari ranah publik dan privat dalam platform bersama, dengan maksud membangun kesepakatan melalui dialog terbuka dan negosiasi konstruktif untuk mengatasi permasalahan tata kelola yang selama ini tidak terselesaikan.

Proses *collaborative governance* terdapat tiga aktor utama yang berperan, yaitu pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Ketiganya bekerja sama dalam penyelenggaraan pemerintahan, di mana pemerintah tidak lagi berperan sebagai satu-satunya aktor dominan namun memerlukan kontribusi dari pihak lain karena keterbatasan sumber daya dan kapasitas. Sebagai contoh, sektor swasta diharapkan tidak hanya mencari keuntungan pribadi tetapi juga turut serta dalam mendukung agenda publik.

a *Proses Collaborative Governance*

Model Ansell dan Gash merupakan sebuah kerangka untuk tata kelola yang berbasis kolaborasi. Dalam konteks tata kelola kolaboratif, pemilihan pemimpin yang tepat sangat penting untuk memastikan bahwa kolaborasi dapat berlangsung dengan baik. Pemimpin tersebut harus mampu mempertahankan struktur horizontal dalam tata kelola, sekaligus mendorong pengembangan hubungan dan pembentukan gagasan-gagasan baru.. *Collaborative governance* ada untuk merespon permasalahan publik melalui kerjasama antar berbagai pemangku kepentingan, dan diharapkan keterlibatannya dapat membuat penanganan permasalahan menjadi lebih efektif dan efisien.



Gambar 1.1 Model Collabotarive Governance Ansell and Gash

Sumber: Ansell dan Gash (dalam Fawwaz, 2017)

Proses kolaborasi dimulai dengan interaksi langsung yang berfungsi untuk membangun rasa saling percaya. Dari sini, tingkat komitmen dalam kolaborasi dapat meningkat. Tingginya komitmen memungkinkan terciptanya pemahaman

yang sama dalam merumuskan permasalahan, mengenali nilai-nilai, dan menetapkan tujuan yang jelas.

Adanya kesamaan dan kesepahaman ini, para pemangku kepentingan dapat merencanakan strategi untuk menjalankan kolaborasi secara efektif. Kolaborasi dilaksanakan melalui beberapa tahap, dan menurut Ansell & Gash (2008, hal. 558-561), tahapan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a). Face to face dialogue:

Proses *governance* kolaboratif dimulai melalui dialog langsung antara semua pihak yang terlibat. Dialog ini sangat penting untuk mengidentifikasi peluang serta manfaat yang dapat diperoleh oleh kelompok. Ansell and Gash (2020) pada *Collaborative Governance: Prinsip dan Praktik*, Partisipasi yang lebih intensif memungkinkan lebih banyak perspektif dan informasi yang beragam, yang akan memperluas cakupan pembahasan isu dan dapat meningkatkan kualitas keputusan.

b). Trust building:

Kolaborasi bukan hanya sekadar proses negosiasi, tetapi juga usaha untuk membangun kepercayaan di antara para *stakeholder*. Proses membangun kepercayaan ini sangat penting sejak awal kolaborasi dimulai dan mencakup penetapan tanggung jawab masing-masing pihak, tidak hanya semata-mata untuk keperluan negosiasi. Membangun rasa percaya perlu dilakukan ketika proses kolaborasi dimulai dan tanggungjawab masing-masing *stakeholder*. Ansell dan Gash pada Karakteristik *Collaborative Governance* (2016:175) *Trust Building* merupakan upaya merespon pengaduan masyarakat dalam suatu

forum baik formil maupun semi formil yang berguna untuk membangun rasa kepercayaan serta membicarakan terkait perkembangan dari kolaborasi itu sendiri.

c). Commitment to process:

Salah satu elemen kunci dalam kolaborasi adalah komitmen, yang mencerminkan niat atau motivasi para peserta untuk aktif dalam tata kelola kolaboratif. Setiap *stakeholder* perlu memiliki komitmen yang kuat untuk mengurangi potensi risiko dalam kolaborasi. Wulandari dan kurniawan (2023) dalam pengaruh alokasi sumber daya dan partisipasi *stakeholder* terhadap keberhasilan proses evaluasi program publik, komitmen memastikan bahwa sumber daya didedikasikan untuk mendukung proses secara keseluruhan dan bahwa semua *stakeholders* terlibat dalam memantau dan menilai efektivitas serta kemajuan proses kolaboratif.

d). Shared Understanding:

Dalam kolaborasi, semua pihak yang terlibat harus memiliki pemahaman yang seragam mengenai tujuan yang ingin dicapai. Artinya, setiap aktor sepakat tentang hasil yang dapat mereka raih bersama. Widiastuti dan Wijaya (2021) dalam kesepakatan visi dan misi dalam Proses *Governance* Kolaboratif : Implikasi untuk pengelolaan proyek bersama, *Shared Understanding* melibatkan upaya meningkatkan kapasitas dan pemahaman bersama antar *stakeholders* untuk memastikan bahwa semua pihak memiliki persepsi dan tujuan bersama untuk mendukung efektivitas kolaborasi.

e). Intermediate outcomes:

Proses kolaborasi juga menghasilkan output, yang mencakup pencapaian tujuan dan manfaat dari kolaborasi, serta adanya keberhasilan-keberhasilan kecil sepanjang perjalanan proses tersebut.. Hasil sementara ini juga dianggap menjadi faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan kolaborasi jangka panjang. menurut ansell dan gash (2007), terdapat 3 jenis hasil sementara utama yang perlu dicapai dalam proses *collaborative governance*, yaitu:

1. *Trust building*: kepada seluruh aktor terlibat (*stakeholder*). kepercayaan merupakan elemen penting agar komunikasi terbuka dan jalannya kerjasama lebih lancar.
2. *Commitment to Process*: Komitmen terhadap proses dari semua pihak yang terlibat sangat penting. Mereka harus menunjukkan kemauan dan keterlibatan aktif dalam memastikan kelangsungan kolaborasi. Selain itu, pemahaman bersama mengenai masalah dan langkah-langkah untuk mencapai tujuan juga krusial.
3. *Shared Understanding*: Pemahaman bersama ini membantu menjembatani perbedaan perspektif dan kepentingan di antara para pemangku kepentingan.

Ansell dan Gash berpendapat bahwa pencapaian hasil sementara dapat memfasilitasi pembelajaran sosial dan memperkuat kapasitas kelembagaan untuk kolaborasi yang lebih efektif.

1.6.6 Faktor Yang Mempengaruhi Proses Collaborative Governance

Menurut *Government of Canada Collaborative Governance* (2008) menjelaskan bahwa terdapat faktor penghambat proses *collaborative governance* yang disebabkan oleh faktor berikut:

(1) Faktor Budaya

Faktor budaya tentunya berperan penting dalam proses *collaborative governance*, yang merupakan pendekatan di mana pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta bekerja sama untuk mengatasi masalah bersama dan membuat keputusan. Meskipun demikian, pola budaya yang terlalu menyalakan diri pada prosedur birokratis dan keengganan menghadapi ketidakpastian berpotensi menghambat keberhasilan upaya kolaborasi. Sikap yang terlalu konservatif dan tidak berani melakukan terobosan dapat menghalangi terciptanya proses kolaborasi yang dinamis dan konstruktif.

Ketika pelayan publik dan pemimpin memiliki ketergantungan yang kuat pada prosedur yang ada dan merasa tidak nyaman dengan risiko, ini bisa membatasi kemampuan mereka untuk beradaptasi dengan lingkungan yang berubah dan untuk menjalankan inovasi yang diperlukan dalam kolaborasi. Terwujudnya kolaborasi tentunya penting bagi pelayan publik dan pemimpin untuk memiliki keterampilan dan kesiapan untuk memasuki kemitraan dengan sikap yang pragmatis dan berorientasi pada hasil. Merujuk pada hal tersebut dalam kolaborasi, penerapan konsep top-down oleh pemerintah dapat menyebabkan berbagai masalah yang menghambat efektivitas dan keberhasilan kolaborasi.

(2) Faktor Institusi

Kolaborasi dapat terjadi disebabkan oleh adanya kecenderungan dari institusi yang terlibat kolaborasi bagi aktor pemerintah yang cenderung menerapkan struktur hierarkis. Kolaborasi yang cenderung memiliki sifat spontanitas sehingga tidak memerlukan aturan ketat secara formal serta juga tidak perlu mengikuti proses tradisional yang biasa dilaksanakan dalam keseharian atau mengacu pada aturan atau SOP yang berlaku. Sebuah kolaborasi di antara berbagai *stakeholders* pemerintah atau lembaga dapat terjadi ketika ada kesadaran akan kebutuhan bersama atau tujuan yang saling mendukung, bahkan jika struktur hierarkis dalam institusi masing-masing tetap ada

Dalam kolaborasi yang melibatkan pemerintah dan non- pemerintah, penting untuk memfasilitasi dialog terbuka dan berbagi keahlian antara berbagai pihak. Pendekatan yang lebih horizontal memungkinkan berbagai entitas untuk berkontribusi secara aktif, menggabungkan pengetahuan dan sumber daya mereka untuk mencapai tujuan bersama. Ini sering kali memerlukan pembangunan jaringan, memperkuat kemitraan, dan memfasilitasi pertukaran informasi secara terbuka. Dalam kolaborasi, transparansi dan pertanggungjawaban yang baik antara berbagai pihak merupakan kunci keberhasilan. Oleh karena itu, penting bagi institusi publik untuk memperbarui praktik-praktik akuntabilitas mereka agar sesuai dengan dinamika kerja sama lintas sektor yang lebih kompleks dan terbuka.

(3) Faktor Politik

Faktor politik memiliki peran yang signifikan dalam proses *collaborative governance*, yang merupakan pendekatan untuk mengelola isu-isu publik melalui kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Kegagalan dalam kolaborasi seringkali dipicu oleh kurangnya inovasi dari para pemimpin dalam menghadapi tujuan politik yang rumit dan dapat memicu konflik. Melalui kolaborasi, konflik tujuan yang biasanya terjadi karena berbagai kelompok kepentingan dapat dikurangi. Namun demikian, kolaborasi juga rentan terhadap perubahan kesepakatan dan kepentingan antara para pihak yang terlibat, yang bisa berujung pada kegagalan kolaborasi. Oleh karena itu, penting bagi para pemimpin dan pihak terlibat untuk terus berinovasi, berkomunikasi dengan baik, dan fleksibel dalam menyesuaikan strategi kolaborasi mereka untuk menghindari kegagalan.

1.6.7 Stunting

Stunting merupakan sebuah kondisi gagal tumbuh pada 1000 Hari Pertama Kelahiran (HPK) dimana kondisi tinggi badan dan berat badan seorang anak lebih rendah dari teman seusianya. Hal ini dikarenakan adanya kekurangan gizi atau sering disebut dengan malnutrisi (Candra, 2020). Stunting sendiri dapat menjadi faktor pemicu terjadinya gangguan perkembangan otak, sensor motorik, pertumbuhan, dan perkembangan mental anak yang terlambat (Rahayu et al, 2018).

Kementrian Kesehatan Republik Indonesia mengumumkan bahwa pengukuran berat badan dan tinggi badan anak secara rutin dapat berguna sebagai upaya monitoring pertumbuhan dan perkembangan anak yang apabila hasilnya lebih rendah daripada seusianya maka dapat menyebabkan stunting. Menggunakan

pengukuran inilah dapat dilakukan berbagai upaya pencegahan dan penanganan stunting.

Strategi Nasional untuk Percepatan Penurunan Stunting, yang diresmikan pada 2018, telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Peraturan ini bertujuan untuk memperkuat upaya penurunan prevalensi stunting dengan meningkatkan kerangka intervensi yang sudah ada. Pemerintah menargetkan penurunan prevalensi stunting hingga 14% pada 2024, yang akan dijadikan acuan untuk target berikutnya hingga tahun 2030. Dalam rencana ini, lima pilar percepatan penurunan stunting akan dijadikan dasar untuk merancang Rencana Aksi Nasional yang mendorong konvergensi program melalui pendekatan keluarga berisiko stunting. Peraturan tersebut juga membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting yang terdiri dari Pengarah dan Pelaksana. Oleh karena itu, Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2021 memerlukan adanya proses *Collaborative Governance* untuk mendukung percepatan penurunan prevalensi stunting.

Merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021, strategi penanggulangan stunting dirumuskan melalui dua pendekatan intervensi berbeda. Intervensi gizi spesifik difokuskan pada penanganan faktor-faktor penyebab langsung terjadinya stunting, yang mencakup upaya perbaikan konsumsi nutrisi dan pengendalian risiko terjadinya penyakit menular, serta melibatkan berbagai program kesehatan terkait.

Di tingkat provinsi, terdapat Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2019 yang bertujuan mempercepat penurunan stunting di wilayah tersebut.

Stunting dalam peraturan ini didefinisikan sebagai kondisi gagal tumbuh pada balita yang mengakibatkan keterlambatan perkembangan fisik, otak, dan organ lainnya, disebabkan oleh kekurangan gizi kronis terutama selama 1000 Hari Pertama Kehidupan. Hal ini ditandai dengan anak yang memiliki tinggi badan lebih pendek dibandingkan teman seusianya. Peraturan ini bertujuan menurunkan prevalensi stunting pada anak di bawah dua tahun (baduta) dan di bawah lima tahun (balita) di kabupaten dan kota, dengan target di bawah 20% melalui delapan aksi konvergensi pencegahan stunting.

1.7 Operasionalisasi Konsep

1.7.1 Proses Collaborative Governance dalam Upaya Penanganan Stunting di Banjarharjo

Proses Collaborative governance dalam penanganan stunting di Kelurahan Banjarharjo Kota Semarang adalah suatu mekanisme kolaborasi yang menyertakan berbagai pihak, baik dari organisasi juga lembaga, dengan tujuan mengatasi penyebab dan mengurangi jumlah balita yang mengalami stunting, serta mencapai pengentasan stunting di Bandarharjo, Kota Semarang. Analisis terhadap Model *Collaborative Governance* ini berdasarkan perspektif Ansell dan Gash (2008), yang mana dipandang sebagai proses sistematis yang mensyaratkan serangkaian tahapan bagi para pelaku yang bermaksud bekerjasama dalam mencapai tujuan yang disepakati bersama. Dalam prosesnya, kolaborasi memerlukan komunikasi, kepercayaan, komitmen, pemahaman, dan hasil. Dalam praktiknya, mekanisme kolaborasi berlangsung sebagai siklus dinamis yang berkesinambungan, melibatkan interaksi berkelanjutan antaraktor yang terlibat guna mewujudkan substansi

kolaborasi yang diinginkan. Tahapan proses kolaborasi sulit ditentukan karena substansi pelaksanaannya yang berbeda.

Collaborative Governance dalam kebijakan yang dilakukan sebagai upaya penurunan Stunting Kelurahan Bandarharjo melalui kolaborasi Ansell and Gash, yaitu:

a. Dialog Tatap Muka (Face to Face Dialogue)

Proses komunikasi langsung dan interaksi secara fisik antara berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang terlibat pada penanganan stunting di Kelurahan Bandarharjo. Proses ini meliputi pertemuan-pertemuan, diskusi, dan musyawarah untuk mengetahui siapa saja *stakeholders* yang terlibat, kapan pelaksanaan diskusi, bagaimana itikad negosiasi yang baik, bagaimana bentuk diskusi yang dilakukan pihak-pihak terkait, dan apa yang menjadi hambatan pelaksanaan diskusi antar *stakeholders* sebagai upaya mewujudkan *Collaborative Governance* dalam percepatan penurunan Stunting. Dialog tatap muka ini bertujuan untuk membangun pemahaman bersama, mengurangi kesalahpahaman, membangun kepercayaan, mengidentifikasi peluang dan tantangan, serta menyusun rencana aksi kolaboratif secara bersama-sama pada penanganan stunting di Kelurahan Bandarharjo. Proses ini dilakukan secara berkala dan berkelanjutan untuk memantau kemajuan, mengevaluasi, dan menyesuaikan strategi jika diperlukan dalam mewujudkan tujuan yang telah dirangkai bersama oleh seluruh pihak yang terlibat dalam masalah stunting.

b. Membangun Kepercayaan (Trust Building)

Rasa Kepercayaan antar *stakeholders* sangat diperlukan dalam kolaborasi. Kunci utama dalam proses ini tentu saja didasari juga oleh kepercayaan yang besar harapannya mampu mengawal kolaborasi hingga mencapai target sasaran. Setiap aktor dan OPD yang terlibat dalam penurunan Stunting di Kelurahan Bandarharjo harus bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya semaksimal mungkin dan disertai juga dengan kehadiran pimpinan yang tidak egosentrisme. Aspek yang diamati dalam membangun kepercayaan selama proses kolaborasi ini adalah Komunikasi yang efektif, mendengarkan semua pihak, dan mengelola konflik secara adil; transparansi dengan berbagi informasi terkait data stunting, program, dan upaya yang sudah dilakukan secara terbuka; serta visi dan misi bersama dalam mewujudkan kebijakan Penurunan Angka Prevalensi Stunting di Kelurahan Bandarharjo.

c. Komitmen dalam Proses Kolaborasi (*Commitment to Process*)

Dalam proses *collaborative governance* untuk mengatasi masalah stunting di Kelurahan Bandarharjo, komitmen kuat dari setiap pemangku kepentingan yang terlibat menjadi landasan penting bagi keberhasilan kolaborasi. Komitmen ini mencerminkan kesungguhan serta tanggung jawab masing-masing aktor dalam melaksanakan peran dan tugasnya selama proses kerjasama berlangsung. Salah satu aspek penting yang diteliti adalah sistem dan mekanisme yang memungkinkan semua pemangku kepentingan untuk terlibat aktif dalam memberikan masukan, bertukar informasi, dan turut serta dalam pengambilan keputusan. Adanya saling ketergantungan antara para aktor dalam mewujudkan kebijakan penurunan prevalensi stunting juga menjadi faktor penting. Selain itu, para pemangku

kepentingan harus menyepakati tujuan dan strategi kolaboratif yang akan ditempuh bersama. Komitmen terhadap proses kolaboratif juga mencakup ketaatan pada prosedur dan protokol yang telah ditetapkan untuk pengambilan keputusan, komunikasi, dan penyelesaian konflik dalam konteks kerjasama. Hal ini melibatkan partisipasi aktif dari semua pihak yang terlibat dalam proses kolaboratif, termasuk berkontribusi dalam diskusi, memberikan masukan, dan bekerja sama secara sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan bersama, dan upaya mengawasi dan evaluasi, yaitu penanganan stunting di Kelurahan Bandarharjo.

d. Pemahaman Bersama (*Shared Understanding*)

Shared understanding pada proses *collaborative governance* dalam penanganan stunting di Kelurahan Bandarharjo merujuk pada kesepakatan dan kesamaan pandangan diantara pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat umum terkait akar penyebab stunting, dampaknya, serta langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasinya. Para pemangku kepentingan juga perlu menyepakati pembagian tugas dan kewenangan masing-masing pihak dalam pelaksanaan kolaborasi dengan tetap berpedoman pada aturan dan SOP yang berlaku. Melalui adanya kesamaan paham dan persepsi di antara para pemangku kepentingan, proses kolaboratif akan lebih mudah dijalankan secara efektif dan terkoordinasi. Hal ini akan memfasilitasi pencapaian tujuan bersama dalam mengatasi masalah stunting di Kelurahan Bandarharjo.

e. Hasil Sementara (Intermediate Outcome)

Hasil sementara adalah tujuan dari proses kolaboratif. Capaian hasil pada tahap ini belum bisa dinyatakan sebagai hasil akhir dalam penanganan stunting di Kelurahan Bandarharjo melainkan seberapa jauh hasil yang telah bisa dilihat dari keberjalanan sebuah kebijakan dan program. Pada tahap ini, para pemangku kepentingan melakukan upaya evaluasi yang digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menilai apakah berdasarkan hasil dan dampak yang ditimbulkan, tujuan kolaborasi dalam kebijakan penanganan Stunting di Kelurahan Bandarharjo dapat dianggap tercapai atau belum. Penilaian dilakukan dengan melihat pencapaian *small wins* atau cita-cita jangka pendek yang menjadi target awal dalam pelaksanaan kebijakan ini. Jika hasil evaluasi menunjukkan bahwa perkembangan yang diperoleh sudah cukup signifikan meskipun masih belum stabil, maka proses kolaboratif perlu ditingkatkan dan disempurnakan agar dapat menjaga konsistensi penurunan angka stunting. Strategi dan pendekatan kolaboratif harus disesuaikan untuk mengatasi faktor-faktor penyebab ketidakstabilan, sehingga tujuan akhir dapat dicapai secara lebih efektif dan berkelanjutan di masa mendatang.

Tabel 1.5
Operasionalisasi Konsep Collaborative Governance

Fokus	Gejala	Sub Gejala
Proses <i>Collaborative Governance</i> penanganan Stunting di Kelurahan Bandarharjo	a. Face to face dialogue	Keikutsertaan dalam diskusi penanganan stunting di Kelurahan Bandarharjo.
		Diskusi penyebab, dampak, dan cara penanganan stunting di Bandarharjo.
	b. Trust Building	Pemenuhan tanggungjawab masing-masing <i>stakeholders</i> .
		Upaya untuk mendengarkan aspirasi atau keluhan dari masyarakat.
	c. Commitment to process	Kesiapan untuk melanjutkan program penanganan stunting di Bandarharjo.
		Ikut mengawasi dan evaluasi penanganan stunting di Kelurahan Bandarharjo.
	d. Shared understanding	Usaha untuk meningkatkan kesadaran penanganan stunting di Bandarharjo.
		Kesepakatan visi, misi, dan tujuan dalam penanganan stunting di Bandarharjo.
	e. Intermediate Outcomes	Cita-cita jangka pendek dalam penanganan stunting di Bandarharjo.
		Adanya target kerja dalam penanganan stunting di Kelurahan Bandarharjo.

1.7.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Proses Collaborative Governance dalam Penanganan Stunting di Kelurahan Banjarharjo Kota Semarang

Pada penelitian ini akan diidentifikasi berdasarkan faktor pendukung dan penghambat proses *collaborative governance*, yaitu:

1. Faktor Budaya

Faktor budaya dapat memainkan peran penting dalam mendukung atau menghambat proses *collaborative governance* untuk mempercepat penanganan stunting. Stunting adalah masalah kesehatan masyarakat yang kompleks, yang melibatkan berbagai faktor termasuk gizi, sanitasi, akses terhadap layanan kesehatan, praktik makanan, dan faktor sosio-ekonomi. Salah satu faktor budaya yang ditemukan di Kelurahan Banjarharjo dalam penanganan stunting yaitu dari kebiasaan masyarakat dalam memberikan makanan seadanya pada anak, pendidikan yang rendah, keharmonisan, sinergi, dan akuntabilitas yang dilakukan oleh *stakeholders* penanganan stunting.

2. Faktor Institusi

Kecenderungan institusi, terutama di pihak pemerintah, untuk menerapkan sistem hierarkis dapat menjadi hambatan bagi keberhasilan kolaborasi. Sistem hierarkis cenderung menempatkan otoritas dan keputusan pada tingkat yang lebih tinggi dalam struktur organisasi, sehingga menyulitkan komunikasi yang efektif, pengambilan keputusan yang cepat, dan fleksibilitas dalam menanggapi perubahan. Pada proses *collaborative governance* dalam penanganan stunting di Kelurahan

Bandarharjo masih terdapat *stakeholder* yang tidak mengikuti pertemuan diskusi stunting, masih lalai dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dan kurang memahami bagaimana cara yang lebih fleksibel dapat dilakukan untuk mencapai tujuan bersama yaitu penanganan stunting di Kelurahan Bandarharjo.

3. Faktor Politik

Kegagalan dalam kolaborasi seringkali dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk inovasi yang kurang dari para pemimpin dalam mencapai tujuan politik yang kompleks. Faktor politik memainkan peran penting dalam mempercepat penurunan angka stunting melalui proses *collaborative governance*. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan lembaga masyarakat dapat menjadi instrumen yang kuat untuk mencapai tujuan ini. Pada proses *collaborative governance* dalam penanganan stunting di Kelurahan Bndarharjo masih kurang maksimalnya peran dukungan kolaborasi dari pihak pemerintah serta kurang antusiasme masyarakat dalam mendukung program-program yang telah dilakukan pemerintah.

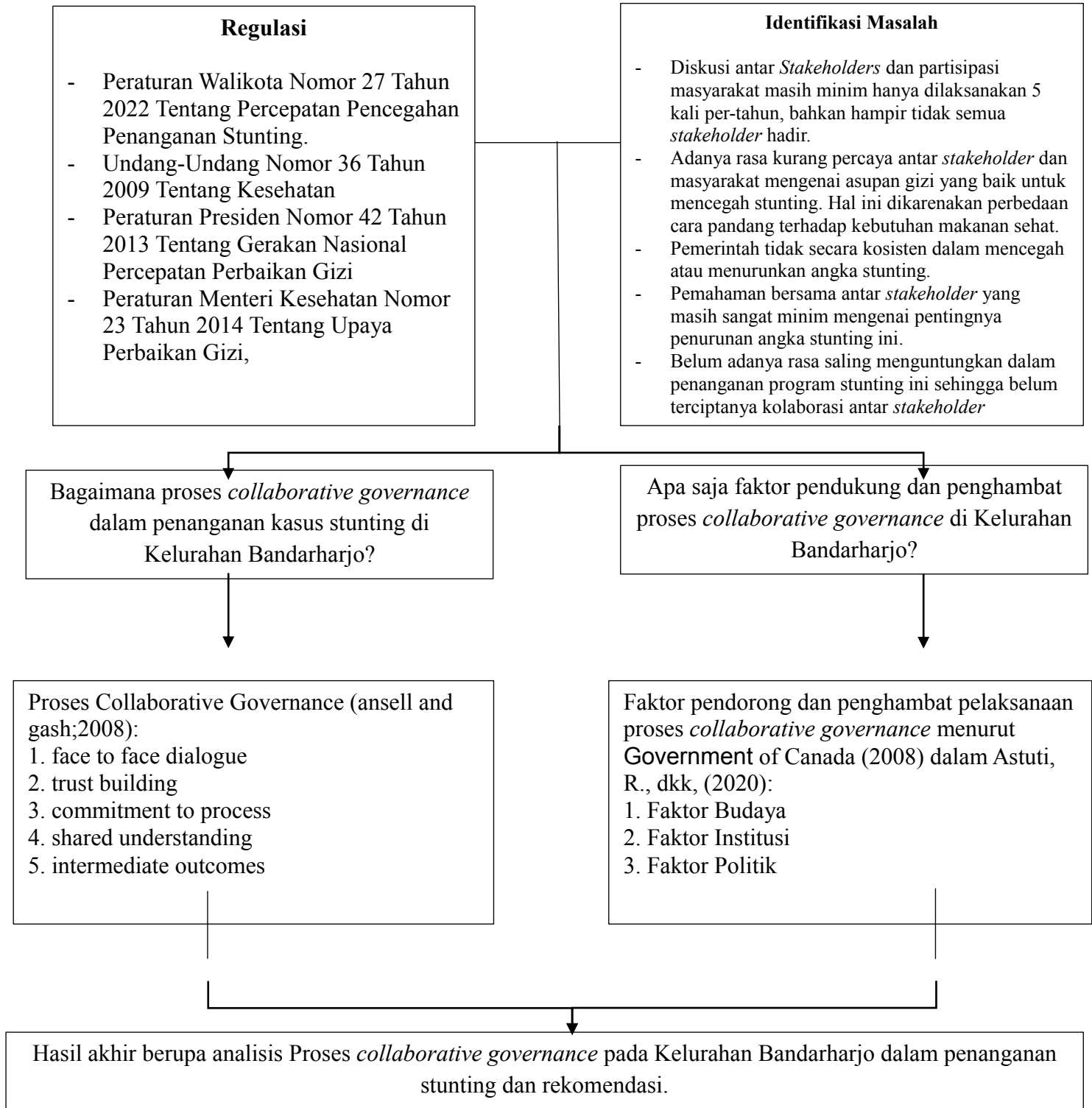
Tabel 1.6

Operasionalisasi Konsep Faktor-Faktor Proses Collaborative Governance

Fenomena	Gejala	Sub Gejala
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Proses <i>Collaborative Governance</i> Dalam Penanganan Stunting di Kelurahan Bandarharjo.	1. Faktor Budaya	Keharmonisan dalam kolaborasi
		Loyalitas dalam pelaksanaan program
		Partisipasi dalam kolaborasi
	2. Faktor Institusi	Alokasi anggaran yang memadai

		partisipasi dan keterlibatan publik.
		Keberadaan SOP sebagai acuan kolaborasi
	3. Faktor Politik	Transparansi dalam proses kolaborasi
		Kekuatan politik dan intervensi <i>stakeholders</i>
		Inovasi dan komitmen dari <i>stakeholders</i>

1.7.3 Kerangka Berpikir



1.8 Argumen Penelitian

Menurut pandangan Donahue dan Zeckhauser (2011), *collaborative governance* dimaknai sebagai mekanisme di mana pemerintah berupaya mencapai tujuan publik melalui kerjasama lintas organisasi dan antarindividu. Emerson (2013) melihat dinamika kolaborasi sebagai siklus interaksi yang kompleks, dengan komponen utama mencakup pemahaman prinsip bersama, motivasi kolektif, serta kapasitas untuk melaksanakan tindakan secara koordinatif.

Stunting, masalah gizi yang menimbulkan dampak serius pada pertumbuhan anak, masih menjadi sorotan utama di tengah masyarakat Semarang. Fenomena ini mengacu pada kondisi kurang gizi akut yang disebabkan oleh asupan nutrisi yang tidak mencukupi. Stunting salah satu representasi dari kekurangan gizi kronis yang dialami oleh anak selama masa pertumbuhan dan perkembangannya sejak dini. Kekurangan gizi ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya kualitas, jumlah, dan variasi asupan makanan yang dikonsumsi oleh ibu pada masa kehamilannya. Faktor lainnya meliputi pola asuh yang tidak optimal, tingkat kesehatan anak yang rendah, serta kondisi lingkungan hidup yang tidak mendukung. Permasalahan *stunting* di Indonesia merupakan hal yang sedang berusaha ditekan pemerintah demi perbaikan kualitas sumber daya manusia melalui pemberian nutrisi anak sejak berada dalam kandungan hingga masa balita sebagai perbaikan gizi anak secara maksimal. Dalam menangani kasus *stunting* Pemerintah dan Masyarakat harus bekerjasama agar penurunan *stunting* optimal.

1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Tipe Penelitian

Berdasarkan penjelasan Moleong (2010), penelitian kualitatif merupakan pendekatan ilmiah yang bertujuan mengeksplorasi peristiwa melalui ragam metode yang telah ada. Pendekatan deskriptif kualitatif fokus pada pengumpulan data dalam bentuk naratif, visual, dan non-numerik yang diperoleh melalui berbagai sumber seperti wawancara, catatan lapangan, dokumentasi visual, rekaman, serta sumber informasi lainnya.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan sifat deskriptif untuk menganalisis fenomena stunting di Banjarharjo. Peneliti akan melakukan kajian komprehensif dengan mendeskripsikan secara mendalam berbagai aspek sosial, meliputi aktivitas, sikap, dan perspektif individu maupun kelompok, yang diperoleh melalui serangkaian metode pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1.9.2 Situs Penelitian

Moleong (2010) menjelaskan lokus penelitian berkaitan dengan wilayah lokasi penelitian yang dilaksanakan sesuai dengan nama hierarki wilayahnya. Penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki fokus Kota Semarang. Situs penelitian berkaitan dengan domain spesifik penelitian. Situs penelitian yang penulis pilih terbagi menjadi beberapa domain sesuai dengan peran beberapa informan sebagai informan pada penelitian. Situs penelitian ini berada Kelurahan Bandarharjo.

1.9.3 Subjek Penelitian

Merujuk pada pandangan Moleong (2010), subjek penelitian dipahami sebagai individu atau kelompok yang mampu memberikan informasi mendalam terkait permasalahan yang dikaji, yang selanjutnya disebut sebagai informan. Untuk pemilihan subjek, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*, yang menurut Sugiyono (2022) merupakan metode pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan spesifik sesuai kebutuhan informasi penelitian. Pemilihan *purposive sampling* sebagai penentuan informan didasari oleh kepentingan mengenai penurunan stunting di Kelurahan Bandarharjo. Dalam penelitian ini, informan dibedakan ke dalam tiga kategori: informan kunci, informan primer, dan informan sekunder, yang akan memberikan perspektif komprehensif tentang proses *collaborative governance* dalam upaya penurunan stunting di Kelurahan Bandarharjo, Kota Semarang:

1. programmer stunting Puskesmas Kelurahan Bandarharjo.
2. Kepala Puskesmas Kelurahan Bandarharjo.
3. Kader Posyandu.
4. Lurah Kelurahan Bandarharjo.
5. Ibu yang memiliki anak stunting
6. Programmer Stunting Tanoto Foundation.
7. Layanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Semarang.

1.9.4 Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini terbagi menjadi kata-kata, tindakan, sumber tertulis, foto, dan data statistik. Menurut Moleong (2017:157), sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, tindakan, serta data tambahan seperti dokumen dan lainnya. Karena penelitian ini menggunakan berbagai sumber data, peneliti harus benar-benar memahami data dan asal sumbernya karena jika ada kesalahan, hasilnya tidak akan sesuai dengan tujuan.

1) Data primer

Data primer dalam penelitian kualitatif diperoleh secara langsung dari sumber data asli di lapangan. Data ini dikumpulkan melalui teknik seperti wawancara mendalam, observasi partisipan, dan diskusi kelompok terfokus. Sumber data primer dalam penelitian kualitatif meliputi informan kunci yang memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait fenomena yang diteliti. Data primer menyediakan informasi yang kaya, rinci, dan kontekstual mengenai sudut pandang, interpretasi, dan makna yang diberikan oleh para partisipan terhadap isu atau fenomena yang diteliti.

2) Data sekunder

Data pendukung yang diperoleh oleh peneliti secara tidak langsung dari sumber lain disebut sebagai data sekunder. Dalam penelitian kualitatif, data sekunder dapat berupa dokumen tertulis seperti laporan, artikel, buku, jurnal, arsip, catatan rapat, peraturan atau kebijakan terkait, dan berbagai jenis dokumen lainnya yang terkait dengan topik penelitian. Data sekunder juga dapat berupa data statistik, data visual seperti foto atau video, ataupun

hasil penelitian terdahulu yang memiliki kaitan dengan fenomena yang sedang diteliti.

1.9.5 Sumber Data

Lofland (dalam Moleong, 2010) juga menegaskan bahwa kata-kata dan tindakan merupakan sumber data utama dalam penelitian kualitatif, sedangkan dokumen lain menjadi data tambahan. Oleh karena itu, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup sumber tertulis, kata-kata dan tindakan, foto, serta data statistik.

Dalam penulisan mengenai Kolaborasi Akselerasi Penurunan Tingkat Stunting di Kelurahan Banjarharjo, terdapat dua jenis sumber data yang digunakan:

1. Data Primer, Ini adalah data yang diperoleh langsung dari sumber yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Contoh data primer adalah hasil wawancara langsung antara peneliti dan informan. Dalam penelitian ini, informan yang dilibatkan adalah para pemangku kepentingan yang bertanggung jawab dalam penanganan kasus stunting di Banjarharjo.
2. Data Sekunder, Ini merujuk pada data yang tidak dikumpulkan secara langsung oleh peneliti. Data sekunder diperoleh dari literatur yang relevan dengan masalah yang diteliti, seperti media massa (baik surat kabar maupun internet), studi pustaka, artikel, atau sumber lain yang dapat mendukung penelitian mengenai penanganan stunting dengan menggunakan model Anshel dan Gash.

1.9.6 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah suatu proses untuk memperoleh informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, yang akan digunakan dalam analisis dan penyelesaian masalah. Dalam penelitian ini, terdapat beberapa teknik pengumpulan data yang diterapkan, yaitu:

1. Observasi. *Esterberg* (dalam Sugiyono, 2014) menjelaskan bahwa observasi adalah metode pengumpulan data yang melibatkan pengamatan langsung terhadap interaksi dan perilaku, yang memungkinkan peneliti memahami konteks penanganan stunting dengan model Anshel dan Gash.
2. Wawancara. Menurut *Esterberg* (dalam Sugiyono, 2014), wawancara merupakan proses pertukaran informasi antara dua individu melalui sesi tanya jawab, yang bertujuan untuk mengungkap makna terkait topik penanganan stunting dengan model Anshel dan Gash.
3. Studi Kepustakaan. *Esterberg* (dalam Sugiyono, 2014) menyatakan bahwa studi kepustakaan adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan menganalisis dan mencatat informasi dari berbagai sumber seperti buku, peraturan, dokumen, dan tulisan lain yang relevan dengan isu penanganan stunting menggunakan model Anshel dan Gash (2007).

1.9.7 Analisis dan Interpretasi Data

Sugiyono (2014: 246) menekankan bahwa analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan baik selama maupun setelah proses pengumpulan data. Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2014) mengemukakan bahwa analisis data kualitatif bersifat interaktif dan meliputi tiga langkah utama: reduksi data, penyajian

data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing langkah tersebut:

1. *Data Reduction* (Reduksi Data). Sugiyono (2014) menjelaskan bahwa data yang dikumpulkan dari lapangan harus dicatat dengan detail. Jumlah data yang diperoleh peneliti sebanding dengan waktu yang dihabiskan selama penelitian terkait penanganan stunting. Oleh karena itu, reduksi data diperlukan untuk menyederhanakan informasi agar lebih jelas dan memudahkan proses pengumpulan data selanjutnya.
2. *Data Display* (Penyajian Data). Menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2014), cara paling umum untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah melalui teks naratif yang menggambarkan penanganan stunting menggunakan model Anshel dan Gash. Penyajian dapat berupa deskripsi singkat, bagan, atau hubungan antar kategori yang membantu peneliti memahami situasi dan merencanakan langkah-langkah berikutnya.
3. *Conclusion Drawing Verification*. Sugiyono (2019) menjelaskan bahwa kesimpulan awal bersifat sementara dan dapat berubah jika ada bukti baru yang ditemukan selama tahap pengumpulan data berikutnya. Namun, jika kesimpulan awal didukung oleh bukti yang valid saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan tersebut dapat dianggap kredibel terkait penanganan stunting.
4. *Kualitas Data (Goodness Criteria)*. William (dalam Sugiyono, 2019) menjelaskan untuk memastikan keabsahan data, Triangulasi merupakan

suatu metode cross-validation dalam penelitian kualitatif. Hal ini bertujuan untuk mengevaluasi kecukupan data berdasarkan konvergensi dari beberapa sumber data atau prosedur pengumpulan data yang berbeda. Dalam konteks kualitatif, triangulasi memastikan keabsahan data dengan memeriksa data dari beberapa sumber, menggunakan beberapa teknik, dan melibatkan pengumpulan data dalam berbagai waktu.

- a. Triangulasi Sumber. Triangulasi sumber digunakan untuk memeriksa kredibilitas data contohnya diperoleh dari bawahan, atasan, dan rekan kerja yang berbeda. Setelah itu, data dari sumber yang berbeda tersebut dianalisis untuk menemukan kesamaan, perbedaan, serta sudut pandang yang khas. Selanjutnya, kesimpulan yang dihasilkan akan diverifikasi melalui proses member check dengan ketiga sumber data tersebut. Sumber data yang digunakan yaitu Lembaga kesehatan masyarakat, pemerintah setempat dan masyarakat
- b. Teknik triangulasi dilakukan dengan cara memverifikasi data yang sama menggunakan berbagai metode pengumpulan data. Misalnya, informasi yang diperoleh dari wawancara dapat dikonfirmasi melalui observasi, dokumentasi, atau kuesioner yang berkaitan dengan penanganan stunting menggunakan model Anshel dan Gash. Jika hasil dari teknik-teknik tersebut menghasilkan data yang berbeda, peneliti akan melakukan diskusi lebih lanjut untuk memastikan kebenaran data tersebut atau menerima sudut pandang yang beragam.

- c. Triangulasi Waktu. Perbedaan dalam waktu pengumpulan data juga dapat berpengaruh terhadap validitas dan keandalan informasi yang diperoleh. Pengumpulan data pada waktu yang berbeda dapat menghasilkan temuan yang lebih dapat dipercaya. Untuk mengevaluasi kecukupan data dari segi waktu, peneliti dapat melakukan pengumpulan data pada berbagai waktu atau situasi yang berbeda. Jika terdapat perbedaan dalam data yang diperoleh pada waktu yang berbeda, proses pengumpulan data dapat diulang hingga kepastian dapat ditemukan. Pada penelitian ini digunakan triangulasi sumber data karena pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan sudut pandang yang lebih komprehensif dan mendalam terhadap fenomena yang diteliti.